

# INSTITUSI SOSIAL: PERANNYA DALAM KEBERLANGSUNGAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DI JAKARTA

Loa Mei Ling<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Teknik Perencanaan, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [ellin\\_dca@yahoo.co.id](mailto:ellin_dca@yahoo.co.id)

Masuk: 05-04-2019, revisi: 29-10-2019, diterima untuk diterbitkan: 27-11-2019

## ABSTRAK

Keberadaan ruang publik telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perkembangan warga kota. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan tempat dimana mereka dapat berkumpul dan berinteraksi satu sama lain. Khususnya di kota besar, seperti Jakarta, kepadatan yang terjadi membuat kurangnya lahan yang dapat digunakan sebagai ruang publik. Hal ini tentu menimbulkan kesulitan tersendiri bagi masyarakat untuk menemukan wadah sosial yang mumpuni untuk memenuhi kebutuhannya. Ialah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), sebuah alternatif yang dijalankan oleh pemerintah utk menyiasati fungsi taman maupun area yang terbengkalai di Jakarta. Dihidupkannya kembali ruang-ruang publik di tengah masyarakat diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan warga sekaligus menguatkan hubungan kemasyarakatan antar warga kota. Tesis yang digunakan sebagai acuan evaluasi mengambil dua lokasi, yaitu RPTRA Alur Dahlia yang berada di area Tegal Alur, Jakarta Barat dan RPTRA Kelapa Nias III yang berada di area Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berbekal dasar penelitian tesis ini, akan dipahami lebih lanjut bagaimana institusi sosial mengambil peranan dalam keberhasilan RPTRA, serta mengeksplorasi kedalaman proses pelebagaan hubungan antara masing-masing komunitas pendukung dan RPTRA. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dan dikaji melalui observasi lapangan, wawancara, serta dokumentasi. Hasil temuan penelitian menjelaskan bahwa proses institusional memegang peranan penting dalam keberlangsungan RPTRA di masa depan.

**Kata Kunci:** Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA); Institusi Sosial; Institusional

## ABSTRACT

*The existence of public space has become an inseparable part in the development of city residents. Humans as social creatures need a place where they can gather and interact with each other. Especially in big cities, such as Jakarta, the density that occurs makes the lack of land that can be used as public space. This certainly creates difficulties for the community to find qualified social institutions to meet their needs. It is the Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA), an alternative run by the government to get around the function of parks and abandoned areas in Jakarta. The revival of public spaces in the midst of the community is expected to be able to accommodate the needs of citizens while at the same time strengthening community relations between city residents. The thesis used as a reference for evaluation took two locations, namely the Alfa Dahlia RPTRA located in the Tegal Alur area, West Jakarta and the RPTRA Kelapa Nias III in the Kelapa Gading area, North Jakarta. Armed with the basis of this thesis research, it will be understood further how social institutions take part in the success of the RPTRA, as well as exploring the depth of the process of institutionalizing the relationship between each supporting community and the RPTRA. This research was conducted using a qualitative approach. Data is collected and reviewed through field observations, interviews, and documentation. The findings of the study explain that the institutional process plays an important role in the sustainability of the RPTRA in the future.*

**Keywords:** Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA); Social Institutions; Institutional

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pengertian sederhana dari ruang publik atau yang sering dikenal dengan public space, merupakan sebuah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat luas dalam rangka memenuhi

kebutuhannya. Ruang publik atau ruang terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat tanpa mengeluarkan biaya (Radjawali, 2004). Proses institusional merupakan hal yang lumrah dan selalu terjadi dalam masyarakat. Agar tidak saling bertubrukan, maka dalam melakukan aktivitasnya, masyarakat dipagari oleh aturan, norma, dan nilai-nilai tertentu untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Sebagai makhluk sosial, masyarakat membutuhkan wadah sosial untuk melakukan berbagai macam aktivitas.

Dalam diskusi yang diadakan oleh World Urban Forum, *Cases on Improving Urban Public Space*, 10 Februari 2018, disimpulkan bahwa ruang publik tidak hanya mencerminkan pandangan spiritual dan konotasi budaya, tapi juga membantu warga dalam komunikasi, kerjasama dan menghadiri kegiatan publik secara efisien. Selain itu secara khusus, ruang publik yang baik juga secara maksimal melayani kelompok rentan seperti wanita dan anak-anak.

Menurut Mungkasa (2017), pada *Focused Group Discussion* Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Responsif Gender dan Ramah Anak dipaparkan hasil yang dikaji oleh pemerintah akan ruang publik di DKI Jakarta, diungkapkan bahwa ruang publik Jakarta sebagian besar berupa tempat parkir atau ruang terbuka hijau termasuk kawasan konservasi. Kondisi terkini menyebutkan bahwa RTH hanya berkisar 9.80% dari total Jakarta atau setara dengan 64.95 km<sup>2</sup>, dimana proporsi ini berkurang dari 77.80% dari total luas kota pada tahun 1973. Disebutkan juga bahwa dampak yang terjadi akibat dari kurangnya ruang publik sebagai wadah masyarakat, antara lain: kebutuhan anak untuk ruang terbuka & ruang bermain tidak terpenuhi; tawuran antar warga sering terjadi; pemberdayaan masyarakat stagnan; sasaran pembangunan manusia tidak terfokus; pencapaian penggunaan alat kontrasepsi stagnan; tidak terpenuhinya hak tumbuh kembang yang layak di lingkungan; serta masyarakat yang individualis.

Melihat kebutuhan yang besar dari masyarakat berkenaan dengan ruang publik, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyediakan ruang publik bagi warga ibu kota Jakarta ialah dengan mengeluarkan kebijakan merevitalisasi fungsi taman menjadi taman komunitas interaktif ragam fungsi, sehingga diputuskan mengembangkan ruang publik yang berfungsi lebih dari sekedar RTH (Ruang Terbuka Hijau) dengan sebutan RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak).

Dalam pembangunannya, RPTRA dapat menjadi contoh yang baik atas terjadinya kolaborasi positif antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak swasta melalui penggelontoran dana CSR maupun dengan pihak masyarakat, dalam usaha bersama untuk melakukan layanan publik tanpa adanya perpindahan kepemilikan menjadi privat. Adapun kota Jakarta tidak lagi memiliki banyak lahan yang bisa digunakan warga sebagai ruang publik, dan konsep RPTRA ini menjadi pilihan terbaik untuk diterapkan karena mampu melayani kebutuhan dari berbagai lapisan masyarakat (tanpa memandang gender maupun usia). Melihat perkembangannya di Jakarta, dapat dikatakan program yang dijalankan pemerintah ini berhasil dengan baik. Keberhasilan program agar dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan tidak lepas dari peran serta aktif dari masyarakat sekitar.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisa deskriptif. Jenis-jenis instrument yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Secara lebih spesifik, pendekatan studi kasus dengan tipe *collective case study*, guna memusatkan perhatian pada dua objek yang diangkat sebagai kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu

menangkap konsep dibalik fenomena yang diamati pada RPTRA Alur Dahliar maupun RPTRA Kelapa Nias III.

### 3. KONSEP INSTITUSI SOSIAL

Judson R. Landis (1986: 225) mendefinisikan institusi sosial sebagai norma-norma, aturan-aturan, dan pola-pola organisasi yang dikembangkan di sekitar kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah pokok yang terkait dengan pengalaman masyarakat (Gafri, 2015). Secara singkat, institusi sosial merujuk pada upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mengatasi masalah. Masih dalam pemaparan Gafri, Durkheim mengemukakan bahwa sosiologi mempelajari institusi dan ditemukan perbedaan terjemahan, semisal Selo Soemardjan dan Soelaeman yang menggunakan istilah “lembaga kemasyarakatan” sebagai terjemahan konsep *social institution*.

Fahmi (2017) meringkas pengertian dari beberapa penulis akan institusi sosial termasuk pengertian dari penelitian Ostrom (1992:19), lalu disimpulkan bahwa institusi sosial adalah aturan-main yang mengatur perhubungan antar-individu, antara individu dan komunitasnya, atau bahkan antar-komunitas. Dijelaskan lebih lanjut oleh Fahmi, disebut institusi sosial karena institusi tersebut berperan menguatkan tatanan sosial yang ada, baik melalui azas timbal-balik yang berjalan, praktik saling menjaga asset, dan pengetahuan yang bertemu dengan rasa salingpercaya.

Menurut Koentjaraningrat (Nerika, 2014), Institusi sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan masyarakat.

Cohen (1983) (dalam Nerika, 2014) menyatakan bahwa institusionalisasi adalah perkembangan sistem yang teratur dari norma-norma, peranan-peranan yang ditetapkan dan diterima oleh masyarakat. Loo-mis (1960) (dalam Nerika, 2014) menyatakan bahwa proses institusionalisasi menyangkut semua unsur dan proses sosial yang ada, maka untuk normalah dianggap lebih penting(utama),

Soejono Soekanto (1983) (dalam Nerika, 2014) menyatakan bahwa institusional adalah proses dimana unsur norma menjadi bagian dari suatu lembaga. Norma mempunyai hubungan yang erat dengan unsur sistem sosial lainnya, norma mempengaruhi rangkaian pemilihan tujuan, status peranan (kedudukan), sanksi dan fasilitas dalam mencapai suatu tujuan. Misalnya kekuasaan pada seseorang diatur oleh norma yang ada, berdasarkan norma itu orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap perilaku seseorang

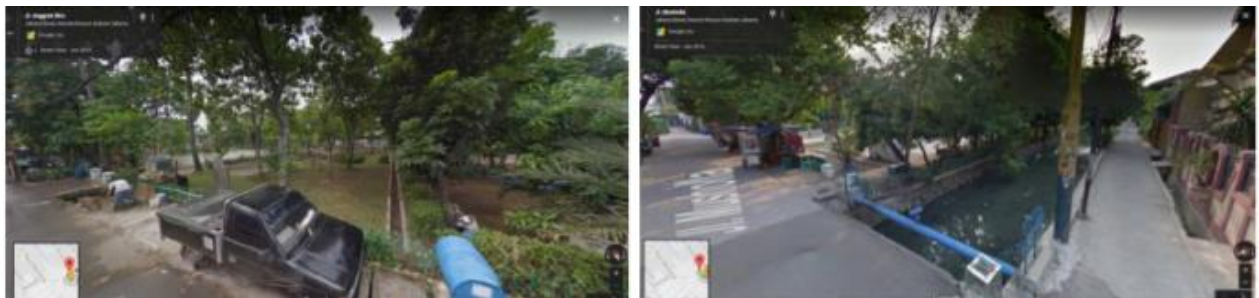
Proses institusionalisasi (pelembagaan) dalam masyarakat terjadi bilamana suatu kelompok memutuskan bahwa seperangkat norma, nilai-nilai, dan peranan tertentu dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidupnya, sehingga diminta agar para anggota masyarakat tersebut mematuhi. Proses-proses seperti ini terjadi dimana-dimana dan terumuskan dalam masyarakat. Proses-proses diatas sepanjang mengenai soal-soal kebutuhan penting dan sepanjang melahirkan sistem yang stabil dan universal, dinamakan lembaga.

Norma dalam masyarakat berguna untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat agar terlaksana sebagaimana yang mereka harapkan. Norma-norma yang ada dalam masyarakat itu mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda, ada norma yang lemah, yang sedang sampai yang terkuat daya pengikatnya, di mana anggota - anggota masyarakat pada umumnya tidak berani melanggarnya.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### RPTRA Alur Dahlia

Berlokasi di Jl. Tegal Alur, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Merupakan kelurahan yang terletak paling timur dengan jumlah penduduk terpadat; luas wilayah ini berluaskan 4.72 km<sup>2</sup>, dengan total populasi tahun 2016 sebesar 93.078 jiwa, serta memiliki tingkat kepadatan 18.728 jiwa/km<sup>2</sup> (Koordinator Statistik Kecamatan Kalideres, 2017). RPTRA Alur Dahlia merupakan RPTRA terbesar di kelurahan ini. Akses termudah untuk mencapai lokasi ini melalui jalan masuk berupa „gang“ yang letaknya hampir bersebrangan dengan SMAN 56 yang terletak di pinggir jalan Kamal Raya. Pada awalnya, peruntukan lahan untuk taman, namun dibiarkan begitu saja, tidak terawat. Lokasi RPTRA berada tepat di tengah permukiman padat penduduk yang kurang tertata, dengan strata ekonomi kelas menengah kebawah.



Gambar 1. Awal Mula Taman Tegal Alur

Sumber: Dokumentasi GoogleMaps tahun 2015, 2018

RPTRA Alur Dahlia diapit oleh Masjid Al-Barokah pada bagian depan dan Gereja Pentakosta di Indonesia serta pasar dibagian belakang. Sedangkan area kanan dan kiri RPTRA merupakan pemukiman penduduk. Pada area yang berada dekat dengan pasar, bangunan cenderung multifungsi. Terdapat beberapa warga setempat yang menggunakan tempat tinggal mereka sebagai tempat berdagang secara temporer, contohnya berdagang pangsit mie di garasi rumah mereka. Sedangkan pada sisi sebaliknya, karena jalan yang lebih kecil sekaligus bersebelahan dengan kali, kebanyakan merupakan rumah tinggal warga dan rumah kontrakan.



Gambar 2. Masjid Al-Barokah & Gereja Pentakosta di Indonesia

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018

Berdasarkan keterangan dari salah satu pengelola RPTRA, diceritakan bahwa sempat terjadi konflik dengan warga pada awal RPTRA Alur Dahlia berdiri. Karena awalnya merupakan taman, warga merasa taman tersebut milik mereka untuk bebas digunakan. Setelah jadi RPTRA, banyak aturan yang diberlakukan oleh pengelola RPTRA untuk menjaga kepentingan bersama. Warga sekitar tidak terima dengan adanya aturan yang dirasa memberatkan, merasa orang lama, dan tidak mau diatur-atur. Proses sosialisasi dengan warga tidak berlangsung dengan instan. Pengelola terus melakukan pendekatan, mengajak bicara para warga yang mempunyai keberatan-keberatan tertentu. Namun berjalannya waktu, secara perlahan warga dapat mengerti dan mampu bersinergi karena terus diberikan pengertian oleh pengelola. Selain itu, pengelola juga turut melakukan sosialisasi kepada komunitas-komunitas setempat. Disebutkan oleh beberapa pengelola bahwa pengelola RPTRA berusaha mengajak para komunitas untuk dapat menggunakan RPTRA sebagai tempat mereka beraktivitas.

### **RPTRA Kelapa Nias III**

Berlokasi di Jl. Kelapa Nias, Jakarta Utara. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara (Gaol, Jainun Lumban; Wijaya, Adi; Hidayat, Taufik, 2017), Kelurahan ini memiliki luas wilayah sebesar 628,45 hektar, dengan total penduduk tahun 2016 sebanyak 55.018 jiwa serta kepadatan penduduk 8.754,97 jiwa/km<sup>2</sup>, menaungi 26 RW dan 246 RT. RPTRA ini dibangun dalam kompleks pemukiman warga yang berada di belakang jalan Boulevard Kelapa Gading, dengan akses masuk melalui pintu gerbang yang letaknya tak jauh setelah café upnormal. RPTRA ini berada tepat di belakang kantor Kelurahan Pegangsaan Dua. Lokasi RPTRA ini dapat dijangkau dengan berjalan kaki dari Mall Kelapa Gading 5. RPTRA ini berada tepat ditengah kompleks perumahan yang tertata, dengan strata ekonomi menengah ke atas.



Gambar 3. Awal Mula Taman Nias III

Sumber: Dokumentasi GoogleMaps tahun 2015, 2018

Sebagaimana taman warga pada umumnya, taman ini asri dikelilingi dengan pohon yang rindang dan disertai dengan mainan sederhana untuk anak-anak. Taman ini dikelola oleh warga setempat. Namun hampir sama dengan yang terjadi pada Taman di Tegal Alur, Taman akhirnya terbengkalai dan tidak terurus. Pengubahan taman menjadi RPTRA membuat taman kembali digunakan oleh warga maupun komunitas-komunitas setempat.

Sedikit berbeda dengan yang terjadi di Kelurahan Tegal Alur. Diceritakan bahwa warga juga melihat taman terbengkalai lebih baik dimultifungsikan menjadi RPTRA, sehingga warga mendukung saat team (sudin) perumahan ingin melakukan perubahan. Proses transformasi dari taman menjadi RPTRA dapat dikatakan berjalan mulus, tidak menemukan hambatan yang



berarti. Dikatakan oleh salah satu pengurus RPTRA, mudah untuk mengundang ibu-ibu kompleks untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh RPTRA. Banyak terlihat anak-anak bermain ayunan, sepatu roda, hingga main lego di area perpustakaan. Pengelola RPTRA turut mengundang komunitas setempat untuk dapat memaksimalkan fasilitas RPTRA.

### **Proses Institusional**

Pengadaan dari acara dan kegiatan yang dilaksanakan di RPTRA menjadi salah satu penggerak terjadinya interaksi yang lebih dekat antar warga. Tak sebatas saling bertegur sapa semata. Dengan mengikuti kegiatan atau acara yang diadakan di RPTRA, diharapkan dapat terjalin suatu ikatan yang lebih mendalam karena memiliki ingatan dan pengalaman tertentu yang sama.

Pada titik ini, warga berperan penting untuk dapat saling merangkul satu sama lain. Entah dengan mengajak bergabung dengan komunitas yang sesuai dengan hobi seperti senam atau bulu tangkis, maupun terus mengajak serta tetangga sekitar untuk turut serta mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di RPTRA. Apabila hal ini dapat terus dilakukan secara berkala, tentu akan memperkuat kohesi sosial warga. Kedekatan yang akhirnya timbul karena interaksi yang dilakukan dalam wadah RPTRA sebaiknya dipererat hingga diluar lingkungan RPTRA. Diharapkan agar tiap warga dapat merasa sebagai bagian dari keluarga besar suatu lingkungan bukan hanya dari kesamaan kawasan tempat tinggal semata. Apabila kohesi sosial antar warga telah kuat, maka permasalahan-permasalahan sosial dapat dengan mudah terdeteksi dan ditangani.

### **Analisa Proses Institusionalisasi Area sekitar RPTRA Alur Dahlia**

Berdasarkan paparan pemahaman diatas, penulis mengamati apa yang terjadi di lingkungan sekitar RPTRA Alur Dahlia. Penulis menduga proses institusionalisasi belum terjadi pada RPTRA Alur Dahlia. Belum terlihatnya perilaku kolektif dari warga sekitar yang mendukung RPTRA. Penulis belum melihat adanya ikatan kepercayaan antar-warga. Penulis merasakan suasana atau atmosfer yang berbeda dengan yang berlangsung di RPTRA Kelapa Nias III. Antar pengguna RPTRA terasa menjaga jarak dan individual, meskipun terlihat bersama-sama menggunakan fasilitas RPTRA. Interaksi antara warga dengan Pengelola RPTRA pun tidak selepas yang terjadi di RPTRA Kelapa Nias III. Hubungan timbal balik belum terlihat pada RPTRA Alur Dahlia. Kecenderungan yang dilihat oleh penulis, masyarakat cenderung bersifat pasif dan hanya menjadi penerima semata.



Gambar 4. Suasana Siang Hari di RPTRA Alur Dahlia

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018

Selain itu, penulis menduga institusi sosial ditengah masyarakat juga masih belum terbentuk dengan sempurna. Komunitas yang ada pada area sekitar masih belum melembaga. Komunitas yang terbentuk pun belum dapat sepenuhnya merangkul masyarakat sekitar. Gafri (2015

menjelaskan bila kegiatan penting tertentu telah dibakukan, dirutinkan, diharapkan, dan disetujui, maka perilaku itu telah melembaga. Peran yang melembaga adalah peran yang telah dibakukan, disetujui, dan diharapkan; biasanya dipenuhi dengan cara-cara yang sungguh-sungguh dapat diramalkan, lepas dari siapa orang yang mengisi peran itu.

### **Analisa Proses Institusionalisasi Area sekitar RPTRA Kelapa Nias III**

Penulis menduga proses institusionalisasi telah terjadi pada RPTRA Kelapa Nias III. Penulis telah melihat perilaku kolektif dari warga untuk ikut menyemarakkan pengelolaan dan pemanfaatan RPTRA. Kepercayaan antar warga telah terbentuk, dan kepercayaan pada RPTRA dan para pengelola juga sudah nampak pada sebagian warga. Penulis menduga ikatan yang telah terbentuk dalam warga merupakan hasil dari institusi sosial yang telah terbentuk. Selain itu, penulis juga melihat hubungan timbal balik yang terjadi antara warga dan RPTRA.



Gambar 5. Suasana Siang Hari di RPTRA Kelapa Nias III

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018

Dapat dikatakan pula bahwa institusi sosial pada kawasan ini telah matang. Secara lebih detail, institusi sosial yang terbentuk bersifat keagamaan yaitu komunitas katolik. Pada area sekitar RPTRA Kelapa Nias, banyak warga yang beragama katolik. Untuk menjaga kerukunan dan menguatkan pertumbuhan iman, dibuatlah komunitas-komunitas yang lebih kecil untuk dapat menjalin hubungan antar umat yang lebih baik sekaligus sebagai tempat untuk saling menguatkan antar umat.



Gambar 6. Aktivitas Warga Dalam Memperingati Hari Kartini

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

Pada RPTRA Alur Dahlia, penulis memiliki 2 kesimpulan, yaitu: Pertama, proses institusionalisasi belum terlihat; Kedua, institusi sosial pada area sekitar RPTRA Alur Dahlia belum terbentuk secara matang dan melembaga. Dari dua kesimpulan diatas, penulis berani berargumentasi bahwa selama proses institusionalisasi ini belum „jadi“, pemerintah harus memberikan perhatian khusus untuk menjaga keberlangsungan RPTRA. RPTRA sepenuhnya harus disokong oleh pemerintah. Begitu pemerintah memutuskan mundur dari rantai pengelolaan untuk dikelola oleh warga, maka RPTRA tidak akan dapat bertahan atau berkelanjutan. RPTRA akan mati secara perlahan.

Pada RPTRA Kelapa Nias III, penulis menyimpulkan 2 hal, yaitu: **Pertama**, proses institusionalisasi telah berjalan dengan baik, dan telah terbentuk „embrio“ nya; **Kedua**, institusi sosial pada area sekitar RPTRA Kelapa Nias III telah terbentuk dan melembaga. Proses institusionalisasi dan Institusi sosial yang telah berjalan pada kawasan ini menjadi sinyal positif bagi keberlangsungan RPTRA. Dari dua kesimpulan diatas, penulis berani berargumentasi tanpa adanya campur tangan dari pemerintah sekalipun, RPTRA tetap dapat berkelanjutan di masa mendatang. Warga sekitar masih mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan baik secara lingkungan maupun sosial pada cakupan area mereka.

##### Saran

Rekomendasi yang dapat diberikan, yakni: memperbanyak kegiatan kemasyarakatan pada masing-masing RPTRA guna merangkul warga sekitar, serta melakukan sinergi dengan komunitas-komunitas yang berada sekitar lingkungan untuk mendorong kebersamaan. Dibutuhkan peran dari tiap lapisan pemangku kepentingan agar proses sosialisasi mampu berjalan dengan baik dan menyeluruh.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, E. (2017). Epilog: Mengokohkan Institusi Sosial untuk Kesejahteraan Rakyat. In QJulmansyah, & Y. D. Erliana, *Jejak Warisan Yang Tersisa: Kisah Memudarnya Pengetahuan Lokal Masyarakat Sumbawa* (pp. 167-170). Sumbawa Literacy Institute.
- Gafri, S. (2015, Oktober 18). *Pengertian dan Contoh Lembaga Institusi Sosial dalam Sosiologi*. Retrieved Mei 22, 2018, from Blog Psikologi: <http://blogpsikologi.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-dan-contoh-lembagainstitusi.html?m=1>
- Gaol, Jainun Lumban; Wijaya, Adi; Hidayat, Taufik. (2017). *Kecamatan Kelapa Gading Dalam Angka 2017*. Jakarta Utara: BPS Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Koordinator Statistik Kecamatan Kalideres. (2017). *Kalideres Dalam Angka 2017*. DKI Jakarta: Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mungkasa, O. (2017, Agustus 18). Ruang Publik Terpadu Ramah Anak / RPTRA: Konsep, Implementasi dan Pembelajaran. *FGD Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Responsif Gender dan Ramah Anak*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Nerika, D. (2014). *Makalah Sosiologi: Institusionalisasi dan Institusi-Institusi Sosial*. Retrieved Mei 26, 2018, from <http://nerikadina.blogspot.co.id/2014/11/institusionalisasi-dan-institusi.html>
- Radjawali, I. (2004). Pemahaman Terhadap Pola Aktifitas Ekonomi Untuk Mengidentifikasi dan Melakukan manajemen Konflik pada Ruang Terbuka Publik. *Symposium Nasional "Managing Conflicts in Public Spaces Through Urban Design*, (pp. 83-91).